

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agus Budiono, *Bahan Kuliah Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, 2016.

Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang, 2015.

Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCEUIN Jakarta, 2000.

Bintar R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.

Hendarmin Ranadirekta, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2015.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentaris Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Ni'matul Hudan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

RatnaDewiPettatolodanKhairulFahmi,*KajianEvaluatifPenangananPelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Badan PengawasPemilihanUmum RepublikIndonesia, Jakarta, 2020.

Ridwan HR,*Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pres,2011.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada PenulisanTesisdan Disertasi*,Jakarta, RajawaliPres 2013.

Soedarsono,*MahkamahKonstitusisebagaiPengawalDemokrasi*,SekretariatJenderal danKepaniteraanMahkamahKonstitusiRepublikIndonesia,Jakarta,2005.

SyamsuddinHaris,*Struktur,ProsesdanFungsiPemilihanUmum,CatatanPendahuluan dalam pemilihanUmumdiIndonesia*,PPW-LIPI, 1997.

SamuelP.Huntington, *GelombangDemokrasiKetiga*,Jakarta,Grafitti,1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu TinjauanSingkat*,Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*,Jakarta,UIPres,1986.

Sudino Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty,2008.

TopoSantoso, *TindakPidanaPemilu*,Jakarta,SinarGrafika,2006.

ZainalArifinHoesein,*PenataanPemilihdalamSistemPemilihanUmum*,RajawaliPers , Jakarta, 2017.

ZainuddinAli, *MetodePenelitianHukum*,Jakarta,SinarGrafika,2009.

YorizaAsra,et.al.,*JejakPengawasanPemilu2019; MenjagaSuaraRakyatLimaPuluhKota*, Bawaslu LimaPuluh Kota, LimaPuluh Kota, 2019

## **PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun

1945.KitabUndang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2014tentangPemilihanGubernur,Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota.

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PT.Pdg. Putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Tj.

Pati Pengadilan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN. Tj.Pati.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 19.Pid.Sus/2021/PT.Pdg.

## **JURNAL DAN MAKALAH**

Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia Serentak*, Jurnal Konstitusi Vol. 17, No.2, Juni 2020.

Aprista Ristyawati, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Crepido, Vol.2, No.2, November 2020.

Jimly Asshiddiqie, Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 4, Desember 2006.

Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, 2015.

Refly Harun, makalah disampaikan dalam seminar nasional dan *call for papers* "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas", Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018.

## WAWANCARA

### **Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:**

Markoni, S.H., Divisi Penegakan Hukum Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 20 Agustus 2021.

Zumaira, Divisi Penegakan Hukum Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 20 Agustus 2021.

### **Kepolisian Resor Lima Puluh Kota:**

Muhammad Rosidi, S.IK, S.H., Kasat Reskrim Polres Lima Puluh Kota pada tanggal 18 Agustus 2021.

Iptu Novriandi, S.H., KBO Polres Lima Puluh Kota tanggal 18 Agustus 2021.

### **Kejaksaan Negeri Payakumbuh:**

Adhitya Febricar, S.H., Kasi Pidum Kejari Payakumbuh tanggal 21 Agustus 2021. Muhammad Afdal, S.H., Jaksa Fungsional Kejari Payakumbuh tanggal 21 Agustus 2021.

## MEDIA INTERNET

<https://padek.jawapos.com/sumbar/LimaPuluh-kota/03/12/2020/bawaslu-proses-dugaan-politik-uang/>, diakses tanggal 23 Januari 2020.

<https://www.sumbarfokus.com/berita-politik-uang-di-lima-puluh-kota-ini-temuannya.html>, diakses tanggal 23 Januari 2020.

<http://50kota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lima-puluh-kota-tangani-enam-kasus-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu>, diakses tanggal 8 Februari 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/>, diakses tanggal 30 Maret 2021



<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18190341/bawaslu-temukan-548-pelanggaran-pidana-pemilu-ini-paparannya>,diaksestanggal30Maret2021.

<https://langgam.id/bawaslu-proses-57-kasus-pelanggaran-pemilu-terbanyak-pidana/>,diakses tanggal30 Maret 2021.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan>,diaksestanggal30Maret2021.

<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>,diaksestanggal 26April 2021.

<https://pshk.uii.ac.id/2018/03/mengenal-pelanggaran-pilkada/>,diaksestanggal31Juli 2021

